



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahman Hadi, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP.196909141990031004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET	BIRO/PUSAT
1.	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	1. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	90	Persentase	Biro Persidangan
2.	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	2. Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	90	Persentase	Biro Persidangan
3.	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	3. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	76	Persentase	Biro Persidangan
		4. Rasio draft peraturan / keputusan dan rekomendasi yang	86	Persentase	Biro Persidangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET	BIRO/PUSAT
		diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan			
4.	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	5. Rasio hasil penelitian /kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	90	Persentase	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
5.	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	6. Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	90	Persentase	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
6.	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	7. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,8	Skala Likert (1-4)	Biro/Pusat/ Inspektorat
7.	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	8. Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100	Persentase	Biro Persidangan dan Biro Sekretariat Pimpinan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET	BIRO/PUSAT
8.	Terbentuknya citra positif DPD RI	9. Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	6	Persentase	Biro Protokol, Humas dan Media
9.	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI	10. Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	40	Nilai	Biro OKK, Biro RenKeu, Inspektorat, Biro PHM, Biro Umum
10.	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	11. Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	44	Nilai	Biro OKK, Biro RenKeu, Inspektorat, Biro Sindok
11.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI	12. Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	91	Persentase	Biro/Pusat/ Inspektorat

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif Dan Alat Kelengkapan	Rp 604.977.095.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 565.597.166.000,-

Jakarta, 19 Desember 2023

SEKRETARIS JENDERAL,


Dr. Rahman Hadi, M.Si.
 NIP.196909141990031004